

Pengembangan Kapasitas Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Di Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut

Regional Innovation System Capacity Building (SIDa) In Mekarsari Village, Cibalong District, Garut District

Thomas Bustomi^a, Soleh Suryadi^b, Achdiat^c

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia^{a,b,c}

*^athomas.bustomi@unpas.ac.id, ^bsoleh_suryadi@unpas.ac.id, ^cAchdiati@unpas.ac.id

Disubmit : 2 Maret 2023, Diterima : 21 Maret 2023, Dipublikasi : 8 April 2023

Abstract

The development of innovation in the regions is often not managed properly and is often neglected. The strengthening of the role of Information Communication Technology has led to the need for integration of government services down to the village level so that it is deemed necessary to develop an innovation network model in the context of strengthening the Regional Innovation System (SIDa) at the village level. Based on the 2020 Regional Competitiveness Index (IDSD) measurement, Garut Regency obtained a score of 2.0966 in the moderate category. This IDSD measurement consists of 4 aspects, namely enabling environment factors, human resources/human capital, market factors, and the innovation ecosystem. Of the 4 aspects above, the innovation ecosystem aspect gets the smallest value, namely 0.81. Reflecting on this fact, a design is needed for the development of a regional innovation system at the village government level, with this design it is hoped that it will be able to direct as well as encourage innovation development to run quickly and effectively. The Regional Innovation System (SIDa) for village administration can support the development of rural areas in the regions based on regional advantages and potential. This is one way to contribute to the implementation of regional autonomy. The development of the Regional Innovation System (SIDa) requires systemic management and relationships between village officials and the cooperation of various stakeholders in village development. The development of SIDa is a priority agenda and is an integral part of the village development strategy and provides strengthening of the national innovation system for implementing SIDa.

Keywords: *Regional Innovation System (SIDa) Village Government, Policy Network*

Abstrak

Pengembangan inovasi di daerah sering tidak ditata dengan baik bahkan sering diabaikan. Menguatnya peran Information Communication Technology yang menyebabkan perlunya integrasi pelayanan pemerintah sampai ke tingkat desa sehingga dipandang perlu adanya pengembangan model jejaring inovasi dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di tingkat desa. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 Kabupaten Garut memperoleh nilai sebesar 2,0966 dengan kategori sedang. Pengukuran IDSD ini terdiri dari 4 aspek yaitu faktor penguat/enabling environment, sumber daya manusia/human capital, faktor pasar/market, dan ekosistem inovasi, dari 4 aspek diatas, aspek ekosistem inovasi memperoleh nilai paling kecil yaitu 0,81. Berkaca pada kenyataan itu maka diperlukan sebuah desain bagi pengembangan sistem inovasi daerah ditingkat pemerintah desa, dengan adanya desain ini diharapkan mampu mengarahkan sekaligus juga mendorong agar perkembangan inovasi berjalan secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pemerintahan desa dapat mendukung pengembangan wilayah perdesaan di daerah berdasarkan pada keunggulan dan potensi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka memberi kontribusi pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) memerlukan penataan secara sistemik dan hubungan antar perangkat desa dan kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Pengembangan SIDa menjadi agenda prioritas dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan desa dan memberi penguatan sistem inovasi nasional pelaksanaan SIDa.

Kata Kunci : Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Pemerintah Desa, Jejaring Kebijakan

1. Pendahuluan

Desa Mekarsari adalah salah satu Desa di Kabupaten Garut tepatnya sebelah barat Wilayah Kecamatan Cibalong, dengan Luas 2.941,51 Ha secara administratif terbagi kedalam 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun I : Ciawi, Dusun II : Wanasari, Dusun III :Rancahayam, Dusun IV Bangbayang. Dari Keempat dusun tersebut terbagi menjadi : 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 40 (Empat puluh) Rukun Tetangga (RT).



Gambar 1. Lokasi Desa Mekarsari

Secara geografis berada di wilayah selatan Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Desa Sukanegara
- Sebelah Timur = Desa Karyasari
- Sebelah Selatan = Samudra Indonesia
- Sebelah Barat = Desa Sirnabakti

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Mekarsari secara umum berupa dataran berada pada ketinggian 15 - 20 m dari permukaan laut (dpl), curah hujan rata-rata per tahun cukup tinggi mencapai $\pm 1,274$ mm dengan jumlah hari hujan efektif antara 86-103 hari. Lama penyinaran matahari termasuk sedang rata-rata sekitar 62,4 %, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28° s/d 29.

Desa Mekarsari Merupakan desa tertian dari 11 desa yang ada di Kecamatan Cibalong. Secara geografis Desa mekarsari memiliki wilayah yang luas dan mempunyai Sumber Daya Alam yang memadai dan sangat potensial untuk diolah dan berdayakan secara maksimal. Namun hal tersebut memerlukan proses, waktu dan kinerja yang maksimal.

Orbitasi dan waktu tempuh dari pusat pemerintahan Desa sebagai berikut:

- Jarak dari pemerintahan Kecamatan 6 km, waktu tempuh 15 menit
- Jarak dari Ibu Kota Kabupaten k/l. 90 km, waktu tempuh 180 menit,
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi 150 km, waktu tempuh 6 jam.

Luas wilayah Desa Mekarsari 2941,51 Ha dengan klasifikasi penggunaan lahan sebagai berikut :

- Pesawahan, seluas 1492,64 Ha.
- Pemukiman ,Seluas 371,14 Ha.
- Tanah Perkebunan, seluas 1,245 Ha.
- Kuburan, seluas 4 Ha.

- Tanah Pekarangan, seluas 144 Ha.
- Tanah Perkantoran, seluas 5 Ha
- Tanah Prasarana umum lainnya, 3,5 Ha

Keadaan penduduk Desa Mekarsari sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2017 adalah sebanyak 7.229 orang, ada pertumbuhan laju penduduk dari tahun 2016 sebesar 10 %. Pertumbuhan penduduk dikarenakan adanya penambahan penduduk yang disebabkan masuknya jiwa dari daerah lain karena perkawinan, dan pertumbuhan penduduk secara alami (kelahiran). Hampir 75 % penduduk Desa Mekarsari yang sudah menikah dan dalam masa usia produktif mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, keadaan pemukiman di Desa Mekarsari semakin padat, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian menjadi daerah pemukiman.

Dari sisi pemerintahan, laju pertumbuhan penduduk ini pun dapat terlihat yaitu dari jumlah kepala keluarga yang terdapat di beberapa RT yang pada tahun-tahun sebelumnya terdapat jumlah kepala keluarga rata-rata terdiri dari 50 KK, sedangkan pada tahun ini rata-rata Jumlah KK di setiap RT di atas 58 KK dari total KK : 2.332 yang berada di 4 Dusun, 10 RW dan 40 RT.

Dilihat dari mata pencahariannya, jumlah angkatan kerja penduduk Desa Mekarsari mayoritas bekerja sebagai Buruh Tani 533 orang Petani 260 orang, pedagang 250 orang, Petani 175 orang, Kuli 50 orang, Tukang 75 orang, Wiraswasta pengrajin 25 orang, PNS 75 Orang, Pensiunan TNI/Polri 5 Orang, Pensiunan PNS 85 orang, Pensiunan BUMN 2 orang, Karyawan Swasta 56 Orang, PNS Umum 75 orang, PNS Guru 25 orang, Guru Honorer 35 orang, TNI 5 orang, Polri 1 orang, Karyawan Swasta 56 orang, Pengemudi ojek 27 orang, Pedagang keliling 15 orang, Ustadz 60 orang Dokter 1 orang, Perawat 5 orang, Bidan 4 orang, Dukun Beranak 5 orang Pengrajin 2 orang Pegawai Seni 6 orang, Wartawan 1 orang, Mahasiswa 30 orang, TKI 70 orang, Tidak bekerja 275 orang, Lainnya 105 Orang.

Selisih jumlah tersebut sisanya yaitu ibu rumah tangga, usia sekolah dan yang belum bekerja. Mayoritas penduduk beragama islam, perkembangan serta pertumbuhan syiar islam berjalan dengan baik, saling menghormati sesama serta memelihara kerukunan. Sarana keagamaan sudah representatif, hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya mesjid-mesjid di setiap RW yang merupakan hasil swadaya masyarakat di lingkungan sekitarnya ini merupakan potensi sumberdaya manusia yang belum optimal.

Pada umumnya kondisi perekonomian di Desa Mekarsari cukup memadai, dilihat dari potensi penduduk rata-rata mempunyai mata pencaharian yang layak sehingga taraf hidup semakin membaik walaupun ada beberapa persen yang dapat dikategorikan masih kurang layak dan tercatat sebagai warga miskin. Dengan berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hal tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan di wilayah Desa Mekarsari

Banyaknya angkatan kerja yang bekerja di luar kota yaitu di daerah lain dengan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan tetapi ada juga yang mempunyai kegiatan usaha seperti warung nasi musiman selama pembangunan proyek berlangsung, kegiatan ini dapat menunjang tingkat perekonomian yaitu keadaan masyarakat sangat berpotensi untuk didaya gunakan dan berhasil guna yang dapat

memicu dan menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan desa melalui pemetaan potensi inovasi desa.

2. Metode

Pada umumnya kondisi perekonomian di Desa Mekarsari cukup memadai, dilihat dari potensi penduduk rata-rata mempunyai mata pencaharian yang layak sehingga taraf hidup semakin membaik walaupun ada beberapa persen yang dapat dikategorikan masih kurang layak dan tercatat sebagai warga miskin. Dengan berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hal tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan di wilayah Desa Mekarsari

Banyaknya angkatan kerja yang bekerja di luar kota yaitu di daerah lain dengan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan tetapi ada juga yang mempunyai kegiatan usaha seperti warung nasi musiman selama pembangunan proyek berlangsung, kegiatan ini dapat menunjang tingkat perekonomian yaitu keadaan masyarakat sangat berpotensi untuk didaya gunakan dan berhasil guna yang dapat memicu dan menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan desa melalui pemetaan potensi inovasi desa.

3. Hasil Dan Pembahasan

Mendorong Terciptanya Inovasi Di Desa

Arah kebijakan keempat dalam sistem inovasi di desa yaitu mendorong inovasi daerah, dengan adanya sistem inovasi yang terintegrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi pertumbuhan inovasi yang produktif yang dapat mengakomodir arahan pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, terlihat hasil di lapangan dalam table berikut :

Tabel 1. Indikator Upaya Mendorong Terciptanya Inovasi Di Desa

Pilar SIDA	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi di desa	1. Jumlah apresiasi inovasi terhadap pelaku inovasi 2. Jumlah relawan inovasi
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah	1. Jumlah Publikasi dan sosialisasi budaya inovasi
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	1. Jumlah sosialisasi budaya berjejaring 2. Jumlah komunitas informasi masyarakat (KIM) sesuai standar pelayanan minimum (SPM) KOMINFO
4. Mendorong perkembangan usaha- usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah Kurikulum Teknopreneur 2. Jumlah program tekno-camp
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakni sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan	1. Jumlah komunitas Innovation Development (ID) 2. Jumlah penerapan ID dalam kurikulum pendidikan 3. Jumlah apresiasi terhadap kegiatan ID

Sumber : Desa Mekarsari (2023)

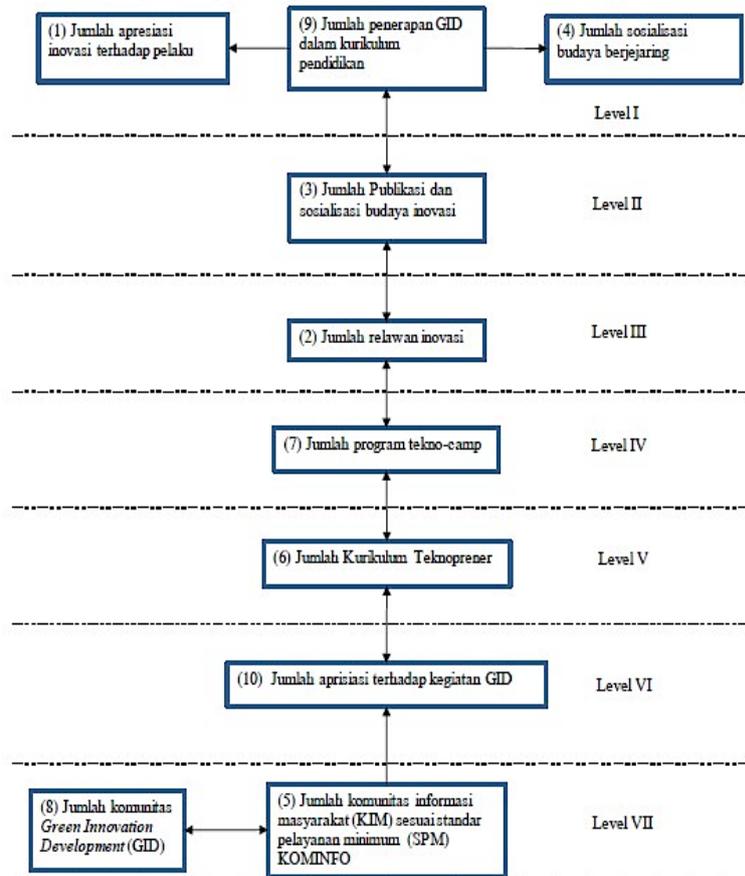
Arah kebijakan merujuk kepada kemampuan dorongan para pelaku inovasi daerah di tingkat desa, sebagaimana table berikut :

Tabel 2. Arah Kebijakan Mendorong Inovasi Daerah

No	Indikator	Ranking Kemampuan Pelaku Inovasi
1	Jumlah apresiasi inovasi terhadap pelaku inovasi	1
2	Jumlah relawan inovasi	3
3	Jumlah Publikasi dan sosialisasi budaya inovasi	2
4	Jumlah sosialisasi budaya berjejaring	1
5	Jumlah komunitas informasi masyarakat (KIM) sesuai standar pelayanan minimum (SPM) KOMINFO	7
6	Jumlah Kurikulum Teknopreneur	5
7	Jumlah program tekno-camp	4
8	Jumlah komunitas Green Innovation Development (GID)	7
9	Jumlah penerapan GID dalam kurikulum pendidikan	1
10	Jumlah aprisiasi terhadap kegiatan GID	6

Sumber : Desa Mekarsari, Januari 2023

Berdasarkan hasil analisis situasi pada arah kebijakan sistem inovasi daerah yaitu Upaya mendorong Inovasi Daerah, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki seperti pada gambar berikut :



Gambar 2. Alur Kebijakan Mendorong Terciptanya Inovasi Daerah

Sumber : Desa Mekarsari, Januari 2023

Membangun Jejaring Kerjasama Antar Daerah

Arah kebijakan yang dapat dilakukan pendalaman dalam sistem inovasi di desa yaitu memperkuat jaringan kerjasama antar wilayah administratif tingkat Rukun Tetangga dan daerah dengan pusat pertumbuhan pemerintahan dan ekonomi di Kecamatan Cibalong. Tujuan utama dari agenda ini adalah mendorong terbukanya pola investasi antar masyarakat dan aktivitas dalam sistem inovasi yang sejalan serta saling melengkapi dan memperkuat rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster potensi di seluruh Kecamatan Cibalong dalam table berikut :

Tabel 3. Indikator Upaya Membangun Jejaring Terciptanya Inovasi Desa

Pilar SIDA	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah	1. Jumlah kerjasama antar wilayah administratif tingkat desa sekitar yang sinkron dengan jejaring di kecamatan. 2. Jumlah kerjasama antar pelaku secara kewilayahan dengan pusat daerah yang sinkron dengan jejaring di kecamatan.
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster 3. industri unggulan daerah	1. Jumlah diversifikasi dan nilai tambah produk
4. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	1. Jumlah kerjasama antar wilayah (RT) 2. Jumlah program RT ke kecamatan.
5. Mendorong perkembangan usaha- usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah pelaku bisnis inovatif dalam klaster RT
6. Meningkatkan pengembangan dan pendencygunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakni sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan	1. Jumlah kebijakan daerah dalam Innovation Development Desa

Sumber : Desa Mekarsari, Januari 2023

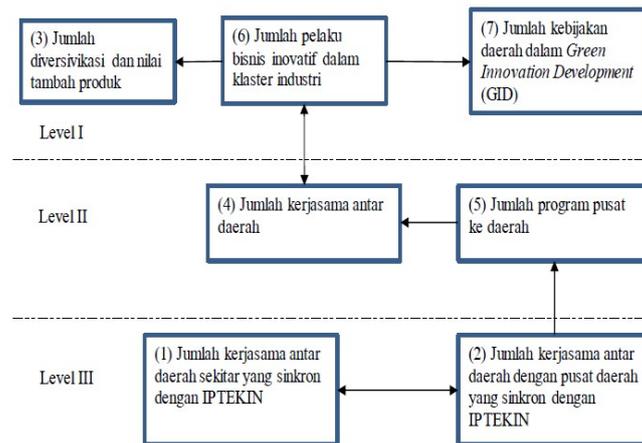
Arah kebijakan keempat, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel factor yang memberikan gambaran dari tingkatan indikator , adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Ranking Arah Kebijakan Membangun Kerjasama Antar Wilayah Di Desa

No	Indikator	Ranking
1	Jumlah kerjasama antar daerah sekitar yang sinkron dengan IPTEKIN	3
2	Jumlah kerjasama antar daerah dengan pusat daerah yang sinkron dengan IPTEKIN	3
3	Jumlah diversifikasi dan nilai tambah produk	1
4	Jumlah kerjasama antar daerah	2
5	Jumlah program pusat ke daerah	2
6	Jumlah pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri	1
7	Jumlah kebijakan daerah dalam Green Innovation Development (GID)	1

Sumber : Desa Mekarsari, Januari 2023

Berdasarkan kesepakatan arah kebijakan sistem inovasi desa yaitu membangun Jejaring Kerjasama Antar Daerah, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki seperti pada gambar berikut :



Gambar 3. Alur Kebijakan Mendorong Jejaring Kerjasama Antar Wilayah di Desa Mekarsari, 2023

Kesepakatan yang diusulkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah innovation yang dapat diartikan sebagai sistem yang mengkreasi jejaring penguatan produk layanan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap sensitivitas lingkungan. Sehingga pencapaian pembangunan tidak melupakan aspek lingkungannya, adapun sektor yang menjadi prioritas yaitu sektorpotensi berbasis pertanian, sektor perdagangan yang mengoptimalkan UMKM, sektor pertanian dan sektor pariwisata.

Sistem inovasi tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut. Berikut inovasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut. Sehingga diperoleh strategis yang ditetapkan , yaitu :

Tabel 5. Strategi Inovasi Dalam Upayan Penanggulangan Permasalahan

Masalah	Strategi Inovasi
1. Permasalahan Aspek Perekonomian	
Sektor industri pengolahan dan agroindustri	
- Kualitas tenaga kerja yang kurang sesuai dengan kebutuhan	- Pengadaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor potensial di desa
	- Menghimpun jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal untuk mengadakan pelatihan
	- Reorientasi pertanian bagi generasi milenial
- Pencemaran lingkungan	- Membuat pengelolaan limbah terpadu
	- Sosialisasi konsep 3R pada sampah yang berdaya guna
	- Aglomerasi sektor industry agar penggunaan sarana dapat terpadu dan optimal
- Belum ada hilirisasi hasil produk pertanian	- Pemberdayaan masyarakat dan produk lokal berbasis pertanian
	- Menstimulus penggunaan teknologi dalam pengelolaan hasil pertanian

	- Inovasi bidang pengembangan agroindustri (teknologi produksi pangan, pengolahan, dan distribusi)
Sektor Industri Pariwisata	
- Pengelolaan yang kurang baik	- Pengadaan pelatihan pengelolan wisata
	- Kolaborasi pertanian dan pariwisata melalui program eduwisata pertanian dan festival budaya dan pertanian (Sasapian pasca panen, atau pada saat festival pembangunan)
	- Pengembangan wisata budaya melalui objek wisata tematik
- Akses menuju lokasi wisata yang kurang baik	- Perencanaan jaringan transportasi berbasis tempat wisata
	- Mengembangkan industri pariwisata berbasis meeting industry
- Fasilitas penunjang (fasum dan fasos) yang masih kurang baik	- Merubah format pengembangan ekonomi wilayah berupa industrialisasi sektor pertanian dan pariwisata
	- Memprioritaskan pengembangan wilayah di daerah tertinggal dengan menggunakan konsep aglomerasi dan kutub pertumbuhan (growth pole) di KBB
Sektor Pertanian	
- Kurangnya SDM yang berkualitas serta	- Reorientasi pertanian bagi generasi milenial
	- Pelatihan dan pendampingan terhadap petani
	- Meningkatkan sistem pendataan sektor pertanian yang baik dan berkelanjutan.
- pasokan input sektor pertanian (bibit, pupuk dan lainnya) kurang lancar;	- Penyediaan input sektor pertanian yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan untur organik
	- Mengadakan pelatihan terhadap petani
- kualitas pengolahan pasca panen masih rendah;	- Penggunaan teknologi dalam pengelolaan pascapanen
	- Adanya sistem distribusi pasca panen yang terintegrasi
	- Optimalisasi koperasi pertanian
Sektor Perdagangan dan UMKM	
- Adanya dominasi barang impor;	- Pemberdayaan masyarakat desa dan UMKM
	- Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam produksi barang dengan ciri khas lokal
- Promosi produk industri lokal masih dirasa kurang;	- Mengadakan pelatihan terbimbing dalam pemasaran produk lokal
	- Penggunaan teknologi informasi untuk promosi produk
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai;	- Perbaiki kualitas prasar tradisional
	- Rebranding pasar tradisional dengan mengadopsi kearifan lokal atau potensi alam setempat
2. Permasalahan Infrastruktur	
- Konektivitas antar kecamatan kurang baik	- Meningkatkan akses keterjangkauan wilayah (infrastruktur)
	- Inovasi transportasi yang dapat menyasati kesulitan geografis.

- Sarana prasarana transportasi kurang memadai	- Menyediakan sarana transportasi bagi masyarakat kepusat layanan publik dan fasilitas publik lainnya - Perencanaan pengadaan sarana prasarana prasarana berbasis transit (TOD)
3. Permasalahan Pelayanan Umum	
- Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah	- Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat hingga jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. - Meningkatkan pelatihan, ketrampilan, dan kecakapan hidup
- Distribusi sarana dan prasarana pendidikan belum merata	- Memperkuat kelembagaan pendidikan non formal dalam penyelenggaraan pendidikan - Mengoptimalkan SKB sebagai media belajar berbasis masyarakat
- Aksesibilitas fasilitas kesehatan terbatas	- Penambahan sarana prasarana dan tenaga medis - Mengembangkan layanan darurat dan cepat tanggap - Memperkuat upaya preventif berupa edukasi kesehatan dan (sosialisasi PHBS dan pelatihan dan ketrampilan penanganan medis dasar)
4. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
- Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan	- Pembangunan Desa Terpadu yang dapat bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri - Optimasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) - Optimasi pemanfaatan potensi desa dalam mendorong program One Village One Product (OVOP)
- Lemahnya pengelola profil desa	Pengadakan Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Belum optimalnya pemahanan dan pemanfaatan teknologi informasi	Pengadaan pelatihan kepada masyarakat desa terkait penggunaa teknologi Penyediaan sarana teknologi yang berbasis di desa
5. Permasalahan Aspek Lingkungan	
Tingginya arus alih fungsi lahan yang mengancam kawasan lindung dan kawasan pertanian serta meningkatkan potensi run-off water yang tinggi	- Konsistensi penerapan RTRW dan penyediaan RDTR untuk menjaga terpeliharanya wilayah konservasi - Inovasi pertanian yang dapat mensiasati keterbatasan lahan - Inovasi/rekayasa bangunan ramah lingkungan - Inovasi sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan
Pencemaran lingkungan berupa limbah industri maupun limbah padat (sampah)	- Merancang kebijakan kompensasi dampak lingkungan yang diberlakukan kepada swasta - Pemberdayaan masyarakat dan swasta untuk mengelola sampah melalui bank sampah - Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan/ pemanfaatan sampah (program zero waste) - Perancangan Sistem Pengelola Limbah Domestik Terpusat

Peningkatan kebutuhan sumber air baku	- Penyediaan dan pengelolaan air secara terpadu - Inovasi teknologi pengolahan air bersih (misalnya rainwater membran distillation)
Potensi rawan bencana yang tinggi seperti potensi gempa sesar lembang dan longsor alih fungsi lahan	- Kebijakan yg diperuntukan kepada swasta dan masyarakat mengenai rekayasa bangunan yang dapat mengantisipasi bencana alam - Edukasi mitigasi bencana kepada swasta dan masyarakat
Adanya wabah Covid-19	- Penerapan protocol kesehatan
6. Permasalahan Aspek Sosial dan Kependudukan	
IPM Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut yang cukup rendah	- Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat hingga jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. - Meningkatkan pelatihan, ketrampilan, dan kecakapan hidup
Pertumbuhan penduduk yang tinggi	- Inovasi desain perumahan untuk mengantisipasi kepadatan penduduk - Inovasi pelayanan dengan penggunaan teknologi
Presentase pemiskinan masyarakat yang tinggi	- Menggalakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program wirausaha - Menciptakan iklim usaha yang baik bagi industri ekonomi rakyat - Memfasilitasi UMKM untuk bekerjasama dengan sektor swasta. Setiap investor/industri besar wajib bekerjasama/ memiliki rekanan dengan UMKM - Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan masyarakat

Sumber : Desa Mekarsari, Januari 2023

Berdasarkan uraian kesepahaman bersama kemudian dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang mungkin dapat dilakukan dalam upaya penguatan Sistem Inovasi Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong, adapun arahan kesimpulan Penguatan SIDA antara lain sebagai berikut:

- Arah kebijakan inovasi penataan dan pengembangan kerangka umum sistem inovasi di desa dilakukan melalui Pengembangan basis data (indikator penting) inovasi dan bisnis; Pengembangan regulasi yang kondusif; Besaran investasi bidang IPTEKIN; Perbaikan pelayanan publik; Pengadaan pemerintah yang pro bisnis inovatif; Pengembangan infrastruktur dasar inovasi dan bisnis dan Pemberian insentif untuk penerapan inovasi dan bisnis.
- Arahan kebijakan inovasi memperkuat kelembagaan pelaksana sistem inovasi daerah dapat dilakukan melalui membentuk pusat inovator dan bisnis didalamnya terdapat forum inovasi yang merupakan pusat klaster industri dan tempat pertemuan pelaku inovasi yang menangani Green Innovation Development (GID) maupun pelaku inovasi.
- Arahan Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dapat dilakukan dengan optimasi kemitraan strategis pemanfaatan layanan teknologi dan IPTEKIN yang dapat menstimulus jumlah wirausaha berbasis IPTEKIN dan UMKM yang menerapkan inovasi; kerjasama lembaga pendidikan dan penelitian dengan UMKM yang dapat meningkatkan aktor yang berperan pelaksanaan Green Innovation Development (GID)

- Arahan Mendorong Terciptanya Inovasi Di desadapat dilakukan dengan optimasi pelaksanaan Green Innovation Develoment (GID) melalui komunitas yang menerapkan kurikulum teknoprener; apresiasi terhadap inovasi serta penerapan Green Innovation Develoment (GID) dalam kurikulum pendidikan
- Arahan Membangun Jejaring Kerjasama Antar Di desadapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri; adanya kebijakan di desayang mendukung Green Innovation Develoment (GID) yang dapat mendatangkan kerjasama dengan stakeholder di di desabaik secara vertical maupun horizontal

Arahan Penyelarasan Dengan Perkembangan Global dapat dilaksanakan dengan peningkatan penerapan standar internasional yang mendukung industri berwawasan lingkungan; meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan inovasi dan dapat meningkatkan produk inovatis berkualitas yang ramah lingkungan dan bersertifikasi.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan

4. Simpulan

Selain itu terdapat pula arahan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Di desa, berikut adalah arahan penanggulangan permasalahan pembangunan Mekarsari Kecamatan Cibalong:

1. Arah kebijakan inovasi peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang tercermin dari kemudahan masyarakat mengakses pusat-pusat pelayanan, meningkatnya kualitas dan standar kelayakan infrastruktur, transportasi, dan jaringan teknologi komunikasi.
2. Arah kebijakan inovasi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang sasaran berorientasi pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berpengetahuan, cerdas, kreatif, dan terampil dengan sasaran meningkatnya kompetensi dan daya saing masyarakat daerah, yang tercermin dari

meningkatnya angka partisipasi pendidikan (terutama jenjang pendidikan menengah atas/setara), peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dan penguatan kelembagaan pendidikan formal maupun non formal.

3. Arah kebijakan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan berdasarkan potensi di desa sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan ekonomi di desa serta mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis kearifan lokal, kreativitas dan ramah lingkungan.
4. Arah kebijakan inovasi pemeliharaan kualitas lingkungan dan antisipasi dampak bencana alam melalui edukasi lingkungan dan mitigasi bencana, ketaatan terhadap regulasi konservasi lahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.

Arah kebijakan inovasi bidang pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa yang sasaran berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan melalui peningkatan kualitas, daya saing ketenagakerjaan agar terserap di pasar kerja dengan penghasilan yang layak, serta menggiatkan usaha ekonomi mandiri melalui kegiatan wirausaha, UMKM.

5. Daftar Pustaka

- Bappeda Kabupaten Garut dan BPS Kabupaten Garut. (2020). *Garut Dalam Angka*. Garut
- Bustomi, Thomas, (2022), *International Journal of Business Ecosystem and Strategy* (2687-2293) 4(2) : 20-27
- Carstensen, Helle Vibeke & Christian Bason. (2019). *Powering Collaborative Policy*
- Clayton, M. Christensen & Michael E Raynour. (2016). *Solusi Sang Inovator : Menciptakan Dan Memelihara Pertumbuhan Yang Sukses*. Jakarta : PT.Serambi Ilmu Semesta.
- Clayton, M. Christensen. (2016). *Solusi Sang Inovator Menciptakan dan Memelihara Pertumbuhan Yang Sukses*. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
- Corwin, Lise, J. Hope Corbin & Maurice B. Mittelmark. (2012). *Producing Synergy in Collaborations:A Successful Hospital Innovation*. *The Innovation Journal : The Public Sector Innovation Journal*. 20.
- Daymon,Christine & Halloway,Immy. (2018). *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation dan Marketing Communications*. Yogyakarta : Bentang,
- Dede Mariana. (2010). *Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan*. *Governance Jurnal*. 1(1)